

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hartini, Rahayu, **Hukum Kepailitan**, UMM Press. Malang, 2012.
- Jono, **Hukum Kepailitan**, Sinar Grafika. Jakarta, 2008.
- Subhan, M Hadi, **Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Manik, Edward, **Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang**, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Asikin, Zainal, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia**, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2011.
- Fuady, Munir, **Hukum Pailit dalam teori dan praktek**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Djumhana, Muhamad, **Rahasia Bank**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Mulyadi, Kartini, Widjaja Gunawan, **Pedoman Menangani Perkara Kepailitan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sjahdeini, Sutan Remy, **Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan**, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010.
- Munir Fuady, Munir, **Pasar Modal Modern**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Gautama, Sudargo, **Komentar Peraturan Kepailitan untuk Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Chidir Ali, Mohammad, Dkk, **Pengertian-pengertian elementer bab-bab Hukum Kepailitan dan penundaan pembayaran**, Mandar Madju, Bandung, 1995.
- Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012.

Sutedi, Andrian, **Hukum Otoritas Jasa Keuangan**, Raih asa Sukses, Jakarta, 2014.

Setiadi, **Dana Pensiun sebagai Badan Hukum**, Citra Aditya bakti, Bandung, 1995.

Simorangkir, **Pengantar Lembaga Keuangan bank dan non bank**, Ghalia, Bogor, 2004.

Tim Redaksitata Nusa, **OtoritasjasaKeuangan**, tatanusa, Jakarta, 2012.

Soekamto, Soerjono, Mamudji, Sri, **Penelitianhukumnormatif**, Raja Grafindo, Jakarta, 2009.

MahmudMarzuki, Peter, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2010.

M Hadjon, Philipus, **ArgumentsaiHukum**, GadjahMada university Press, Yogyakarta, 2011.

Makalah

ZulkarnainSitompul, PadatemuWicara di bidangPerbankanbagi hakim tingkat 4 (empat) lingkunganPeradilan Wilayah Sulawesi Selatan Kerjasama MARI Dan BI, Makassar, 4-5 Juli, 2012.

Ateng Syarifudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang bersih dan bertanggung Jawab, Jurnal Pro Yustisia, Bandung, Universitas Parahyangan, 2002.

PeraturanPerundang-undangan

- Undang-UndangDasar Negara KesatuanRepublik Indonesia Tahun1945 .
- Undang-UndangNo. 8 Tahun1995 Pasar Modal.
- Undang-UndangNomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2004 tentangperubahanatasUndangUndangnomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia danterakhiradalahUndangUndang-UndangNomor 6 tahun 2009 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndangUndangNomor 2 tahun 2008 tentangPerubahankeduaatasUndangUndangNomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia .
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-Undang No 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara .
- Peraturan Pemerintah No 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja.
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 606/KMK.01/2005 tentang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 tentang Pengaturan Modal Ventura.
- Putusan Kasasi No 229 K/ PdtSusPailit / 2013 antara NyTuti Supriatimelawan PT Asuransi Jiwa Buana Putra.